



Cirebon Katon

Informasi dan Informasi Wakil Rakyat



Hari Jadi Kemanakah Prestasi?

Menata Kemuliaan Diri di Hari Jadi



Ilustrasi: Boykedatu

Matang! Kata yang menggambarkan usia Kabupaten Cirebon saat ini. 539 Tahun menjadi momentum untuk merefleksikan diri. Segala capaian pembangunan terus dilanjutkan, persoalan kesejahteraan harus dituntaskan. Misalnya masalah kemiskinan yang tak kunjung terentaskan.

Hari jadi bukan sekedar seremoni tahunan dengan memakan anggaran. Namun, harus disikapi sebagai motivasi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, "Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju, dan Aman".

Tema "Mamayu Hayuning Diri, Mamayu Hayuning Buwana (Menata Kemuliaan Diri, Menata

Kemuliaan Dunia)" yang diusung pada hari jadi Kabupaten Cirebon ke 539 memiliki makna yang dalam. Namun, proses menata kemuliaan tidaklah mudah, perjuangannya pun susah payah. Dibutuhkan langkah-langkah strategis dan konkret dari pemerintah daerah dan semua stakeholder.

Sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Cirebon, seluruh kru majalah Cirebon Katon mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Cirebon ke 539. Usia yang semakin matang semoga berkorelasi dengan segala bentuk kemajuan. Indeks kebahagiaan masyarakatnya pun meningkat. Sehingga visi, misi, dan kemuliaan diri dapat tercapai.

Salam Cirebon Katon!

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Muklisin Nalahudin, SH, MH.
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

Abdul Rohman
(Ketua Komisi 1)

Mad Saleh
(Ketua Komisi 2)

H. Hermanto, SH
(Ketua Komisi 3)

Siska Karina, MH
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag persidangan)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Mochammad Nurhiyana, S.STP., M.Si
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Wiwin Winarti, S.IP
(Kasubag Rapat dan Risaiah)

Ardiles Afla Jatiwanto
(Kasubag Rumah Tangga)

Redaktur :

Yusuf

Reporter :

Maulana • Mu'izz • Hasan • Sarah

Fotografer :

Qushoy

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman

Distribusi :

Firman • Misbah

Korespondensi:

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon

• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Cirebon, Sentra Perdagangan dan Penyebaran Agama Islam



16 | KILAS

Beri Usulan RPKD 2022



18 | PUBLIKA

Usul Fasilitas Pengembangan Budaya



20 | INSPIRASI

Sekolah Alam Wangsakerta Tawarkan Konsep Vokasi dan Bertani



22 | LENS

Pilu Petani di Musim Panen



24 | PROFIL

Siska Karina : Saya Tidak Membatasi Diri Bertemu Masyarakat

28 | DINAMIKA

Dua Raperda Eksekutif Disetujui

30 | Temuan Kekurangan Pajak Parkir

32 | Perlu Penambahan SDM Nakes

34 | Rumuskan Perubahan RPJMD



36 | POTENSI

Mangrove Mina Citra Lestari Berniat Tangkal Abrasi, Ciptakan Ekowisata Memikat Hati

38 | DESA

Palir Ciptakan Ekonomi Mandiri

Cirebon, Sentra Perdagangan dan Penyebaran Agama Islam



Jauh sebelum memasuki era kolonial, Cirebon pernah menjadi pusat perhatian internasional. Hal itu ditandai dengan adanya pelabuhan besar menghampar dari pesisir pantai Gunung Jati hingga Celancang. Wilayah ini menjadi titik penghubung antar bangsa.

Pelabuhan tersebut bernama Muara Djati. Awalnya pelabuhan yang telah ada sejak zaman kerajaan Galuh ini, terletak di bawah kekuasaan keraton Singapura dan Surakanta. Letaknya yang sangat strategis, memudahkan bagi kapal manapun untuk berlabuh. Sementara *Syah Bandar* atau penjaga pelabuhan waktu itu adalah Ki Jumajan Jati atau dikenal Ki Gedeng Tapa.

Menurut Kepala Museum Pangeran Cakra Buana, Saptaji, pada mulanya Muara Djati

hanya digunakan sebagai pasar bagi masyarakat lokal. Masyarakat agraris membutuhkan ikan hasil tangkapan masyarakat pesisir. Sedangkan, masyarakat pesisir membutuhkan rempah-rempah yang ditanam oleh masyarakat agraris.

“Masyarakat pegunungan, mendatangi pelabuhan Muara Djati melalui jalur sungai mengendarai perahu untuk menjual hasil tanamannya ke masyarakat pesisir. Begitu pun sebaliknya,” terangnya.

Seiring waktu, aktivitas tersebut diketahui oleh bangsa asing seperti Cina, Arab, India hingga Malaka yang sedang berlayar. Sekira tahun 1300-an mulailah negara-negara di Asia berdatangan ke pelabuhan Muara Djati untuk melakukan transaksi.

Tepat pada 1415 Masehi, pelaut ulung dan penjelajah asal

Tiongkok Laksamana Cheng Ho dengan pengikutnya pernah bersinggah di Pelabuhan Muara Djati selama seminggu. Tujuannya membeli barang-barang yang diperlukan untuk perjalanan berlayar menuju Majapahit. Seperti beras, gula dan rempah-rempah.

Kedatangan Ceng Ho tersebut, ternyata turut berkontribusi besar bagi kemajuan perdagangan di Muara Djati. Pasalnya Ceng Ho, membeli kebutuhannya melalui barter dengan membangun Mercusuar untuk penerangan pelabuhan Muarajati.

Dengan adanya Mercusuar, pelabuhan muarajati pun semakin terang dan dapat dengan mudah dilihat oleh kapal-kapal lain yang tengah berlayar. Sehingga pelabuhan Muara Djati Cirebon menjadi sentra perdagangan dunia.

Milestones Kabupaten Cirebon

Tahun 1300 M

Negara-negara di Asia berdatangan di Pelabuhan Muara Djati untuk melakukan transaksi perdagangan.

Tahun 1415 M

Penjelajah asal Tiongkok Laksamana Cheng Ho singgah di Pelabuhan Muara Djati. Ia pun membeli bahan pokok dengan mendirikan Mercusuar sebagai gantinya.

Tahun 1420 M

Ulama besar dari Mesir Syech Datul Kahfi berlabuh ke Pelabuhan Muara Djati untuk melakukan dakwah karena dianggap ramai. Ia pun bermukim di sebuah bukit bernama Giri Amparan Jati.

Tahun 1445 M

Pangeran Cakrabuana murid Syech Datul Kahfi *babad alas* membuka pedukuhan kecil bernama alang-alang untuk menyebarkan agama Islam. Saat ini bernama Lemahwungkuk.

Tahun 1479 M

Pangeran Cakrabuana menyerahkan tonggak kepemimpinan Caruban kepada Syech Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Djati. Ia pun berekspansi menyebarkan dakwah Islam hingga menjadi sebuah negara yang besar mayoritas Islam.

Tahun 1482 M

Sunan Gunung Djati menyatakan kemerdekaan Cirebon dari Padjadjaran dengan tidak lagi mengirim upeti. Peristiwa ini disebut ‘Pegot Tetalen Pancen’.

Abad 17

Pada abad ini bangsa Eropa mulai masuk ke perairan Nusantara salah satunya Cirebon untuk menguasai perdagangan. Masa ini dikenal Kolonialisme

1800 M

Penjajah Eropa berhasil menguasai wilayah Cirebon dengan mengganti kesultanan menjadi residen. Kemudian wilayah Cirebon tengah diganti menjadi Rechten Cirebon atau Kabupaten Cirebon dengan Gubernur Raden Simukh Muhammad.

Tahun 1979

Pada tahun ini Ibukota Kabupaten Cirebon berpindah dari awal bertempat di Kotamadya Cirebon menuju Sumber Kabupaten. Pemandahan ini disetujui pemerintah pusat yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1979.



Sentra Penyebaran Agama Islam

Pada Tahun 1420 Masehi, ada seorang ulama besar dari Mesir bernama Syekh Datul Kahfi atau dikenal Syekh Nurjati dengan sepuluh rombongannya singgah ke pelabuhan Muara Djati. Tujuannya untuk melaksanakan kegiatan dakwah Islam. Kedatangannya diterima oleh Ki Gedeng Tapa. Lalu, beliau bermukim di daerah Pasambangan, di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati.

Di tempat tersebut, Syekh Nurjati mendirikan pesantren kecil bernama Amparan Jati. Tentu saja bertujuan mengenalkan dan mengajak masyarakat untuk memeluk agama Islam. Setelah mendengar tentang agama itu, banyak orang berdatangan dan memeluk agama Islam dengan tulus dan ikhlas.

Raden Walangsungang atau dikenal Pangeran Cakrabuana merupakan salah satu murid Syekh Nurjati di pesantren tersebut. Tepatnya pada 1445 Masehi, ia diperintahkan oleh gurunya untuk membuka pedukuhan (perkampungan) di kebon pesisir atau alang-alang (kampung kecil) yang saat ini bernama Lemahwungkuk.

Selang beberapa lama, pedukuhan itu pun berkembang

“*Siapa yang ingin hidupnya tenang ikutilah ajaran saya. Agama damai. Siapa yang ingin hidupnya tenang, mari ikuti apa yang saya lakukan*”

menjadi desa yang besar dan dihuni oleh berbagai etnis. Terdiri dari, Jawa, Melayu, Sunda, Arab, China, Pakistan hingga India yang telah bermukim. Lambat laun perkampungan itu dikenal dengan Caruban yang memiliki arti campuran.

Dalam papan informasi yang dipajang di Museum Sejarah Pangeran Cakrabuana, Pangeran Cakrabuana mengenalkan agama Islam dengan cara yang bijaksana. Ia menjadi orang pertama yang melakukan proses ritual penguburan dengan cara Islam dengan tidak dibakar. Masyarakat yang sebelumnya memiliki ritual berbeda pun dibuat heran.

Namun berkat kepiawaiannya,

Pangeran Cakrabuana mampu menjelaskannya dengan mudah dan diterima masyarakat. Api yang digunakan untuk menyalakan dupa, ia maknai dengan sikap toleransi kepada para penyembah Brahmana. Pangeran Cakrabuana menghormatinya dengan menyiram nisan dan pusara.

Seiring waktu, Pedukuhan Caruban telah berkembang menjadi sebuah negara kecil Ketumenggungan yang dipimpin langsung Pangeran Cakrabuana. Ia pun diberikan gelar Tumenggung Sri Mangana. Pada masa kepemimpinannya, Caruban masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Padjadjaran dengan selalu mengirim upeti.

“Jadi berbagai aturan dari Cirebon selalu menginduk pada Padjadjaran,” terang Chaidir Susilaningrat, pegiat budaya Cirebon.

Hingga pada 1479 Masehi, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kepemimpinannya kepada keponakannya yakni, Syech Syarif Hidayatullah, yang merupakan anak dari adiknya, Nyai Rara Santang. Dalam naskah yang dimiliki Chaidir, gelar pemimpin negara Caruban adalah Susunan Purba Djati atau Sunan Gunung Djati.

Mulailah sejak saat itu, Sunan Gunung Djati memimpin Caruban dengan berekspansi ke beberapa wilayah untuk menyebarkan agama Islam. Dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Djati pun dianggap berhasil karena menerapkan keteladanan, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat.

“Siapa yang ingin hidupnya tenang ikutilah ajaran saya. Agama damai. Siapa yang ingin hidupnya tenang, mari ikuti apa yang saya lakukan. Itulah strategi dakwah Wali Songo yang tidak menggunakan paksaan maupun kekerasan. Tetapi melalui pendekatan perilaku,” kata Chaidir, menirukan penggalan naskah ajaran dakwah Sunan Gunung Djati. •**Muiz**

Pegot Tetalen Pancen
Peristiwa Penetapan Hari Jadi Kabupaten Cirebon

Setiap 2 April tiap tahunnya, pemerintah Kabupaten Cirebon merayakannya sebagai hari jadi Kabupaten Cirebon. Namun bagaimana awal mulanya?

Penetapan hari jadi Kabupaten Cirebon yang biasa diperingati merupakan temuan para sejarawan yang tercatat dalam sejarah. Raden Chaidir Susilaningrat, yang merupakan pegiat budaya Cirebon dan pendiri Kendi Pertula juga mengamini awal mula penetapan hari jadi Kabupaten Cirebon tiap 2 April.

Menurut Chaidir, hal itu bermula saat ‘Caruban’ nama awal Cirebon yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Djati telah berkembang menjadi negara besar dengan mayoritas penduduk Islam. Sehingga ada satu kemauan politik bagi Caruban untuk memisahkan diri, karena memiliki kekuatan di tengah-tengah Padjajaran yang masih hindu.

Peristiwa itu, pada dokumen naskah memiliki nama ‘Pegot Tetalen Pancen’ yang terjadi pada 12 Safar 887 Hijriyah atau bertepatan 2 April 1482 Masehi. Yaitu, kala Sunan Gunung Djati sebagai pemimpin Cirebon menyatakan kemerdekaannya dan berhenti mengirimkan upeti kepada Padjajaran. Mulai hari itu, Cirebon berdiri sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka.

“Jadi yang awalnya di bawah Padjadjaran, menyatakan lepas dan berdiri sendiri sebagai satu negara merdeka berdasarkan syariat islam. 2 April tonggak sejarah berdirinya Cirebon. Supaya masyarakat tahu, Cirebon pernah menjadi negara mandiri yang tidak lagi di bawah kekuasaan kerajaan besar,” jelas Chaidir.

Sementara dalam sejarah pemerintahan, Chaidir menerangkan, Kabupaten Cirebon telah ada sejak 1800 M lalu. Itu terbukti dari catatan sejarah bupati pertama bernama Raden Simukh Muhammad. Se-



mentara perbedaan antara kabupaten dengan kota, diawali pada abad 17 saat bangsa Eropa mulai masuk dan menjajah Nusantara.

Pasukan Inggris dipimpin Gubernur Jenderal Thomas Raffles dalam eksepedisinya, masuk ke Cirebon karena melihat geliat perdagangan yang cukup ramai. Kemudian, mereka pun mengadakan perjanjian dengan Sultan Cirebon yang isinya untuk mengelabui agar memberikan legitimasi menguasai wilayah pelabuhan.

“Jadi kita dikadalin oleh mereka dan merugikan kita semua. Perjanjian itu esensinya melegitimasi orang Eropa untuk lebih menguasai hasil bumi kita. Pada saat itu para

sultan belum cukup punya kekuatan menghadapi, jadi enggak ada pilihan lain. Dan ini tidak hanya di Cirebon saja. Masa ini kita kenal dengan kolonialisme,” terang Chaidir.

Setelah berhasil melakukan perjanjian dagang. Para penjajah Eropa mulai mengembangkan untuk menguasai pemerintahan dan politik. Dimulai dengan membangun sarana koloni prefektur atau residen dalam istilah belanda yang menggantikan kesultanan. Sehingga kerajaan Cirebon sepenuhnya dikuasai penjajah Belanda.

“Residen berkuasa di seluruh wilayah Cirebon meliputi Majalengka, Kuningan, Indramayu bahkan hingga Cirebon tengah,” jelasnya.

Pada tahun 1800 Masehi, wilayah Cirebon tengah itu kemudian dibentuk kabupaten dalam istilah Belanda bernama ‘Rechten Cirebon’ untuk mengatur wilayah tengah yang sentral.

“Makanya itulah kenapa Pendopo Cirebon ada di kota. Karena dulu sentralitasnya di situ,” tandasnya. •**Suf**

Rapor Merah Hari Jadi

Pemkab Cirebon melaporkan keterlambatan pembangunan sejak 2019 lalu. Kondisi tersebut pun diperparah kontraksi yang diakibatkan pandemi hingga tahun 2020. Bagaimana perkembangannya?



Terhitung April 2021 Kabupaten Cirebon berusia 539 tahun. Di usianya itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon terus melakukan berbagai program kerja dan inovasi demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.

Namun di usianya yang tak lagi muda, ada rapor merah yang melaporkan perkembangan kinerja makro pembangunan daerah

Kabupaten Cirebon sejak tahun 2019. Diantaranya mengenai pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, angka pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami kontraksi.

“Pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2019 berada di angka 4,68 persen, masih jauh di bawah provinsi,” terang Masrukhin, Kepala Litbang Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

Terlebih, sejak pandemi Covid 19 menyerang sendi kehidupan di tahun 2020. Sehingga

angka perekonomian pun harus menurun tajam mencapai minus -1,08 persen. Alhasil, tingkat perekonomian Kabupaten Cirebon pun berada pada urutan 11 se Jawa Barat dan urutan bawah ke 4 se Ciayumajakuning.

Bappelitbangda juga mencatat angka kemiskinan tahun 2019 yang masih tinggi sebesar 9,94 persen. Angka tersebut semakin diperparah akibat dampak dari pandemi sehingga naik menjadi 11,24 persen pada 2020. Kemiskinan di Kabupaten Cirebon pun masih berada di atas provinsi dan nasional.

Sementara, angka pengangguran di Kabupaten Cirebon pada 2019 juga tercatat di angka 10,28 persen yang meningkat di tahun 2020 di angka 11,52 persen. Sehingga menempatkan pengangguran di Kabupaten Cirebon berada di peringkat 7 tertinggi di Jawa Barat.

Selanjutnya mengenai capaian IPM di Kabupaten Cirebon. Makhrusin mengatakan, ada tiga komponen yang menjadi tolak ukur kualitas hidup penduduk. Pertama, usia harapan hidup (UHH). Sebelumnya, Kabupaten

Cirebon memiliki indikator harapan hidup yang baik yakni usia 71, 82 tahun. Saat ini, 71, 99 tahun.

Kedua, Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Cirebon di tahun 2019 sebesar 6,71 persen dan meningkat menjadi 6,92 persen tingkat SMP pada 2020. Terakhir, Harapan Lama Sekolah (HLS) SMA di tahun 2019 berada di angka 12,24 persen dan tahun 2020 naik menjadi 12,25 persen.

Masrukhin mengatakan, skor IPM Kabupaten Cirebon secara keseluruhan pada tahun 2019 sebesar 68,69 poin. Ada peningkatan pada tahun 2020 sebesar 68,75 poin. “Hanya saja, meski skor IPM meningkat, pengeluaran perkapita di tahun 2020 mengalami penurunan dari Rp 10,67 juta menjadi Rp 10,34 juta,” paparnya.

Sementara Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2020, Masrukhin menjelaskan, penduduk Kabupaten Cirebon tingkat PAUD berada di 42,03 persen dari target 66,80 persen. Sedangkan APK SD mencapai 119,22 persen dari target 115 persen. Terakhir APK SMP sebesar 157 persen dari target 113 persen.

Selain itu, Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang pendidikan SD pun mencapai 103,75 persen dari target 100 persen, dan APM SMP 139,50 persen dari angka target 98,30 persen.

“Hampir semua sektor terkendala, yang jelas pandemi covid 19 ini berpengaruh sangat besar terhadap sektor pendidikan, infrastruktur, maupun sektor investasi yang membuka peluang kerja,” tandas Hilmi.



Capaian Pembangunan

Namun, selain kontraksi dari sektor ekonomi maupun pendidikan akibat pandemi covid 19. Sepanjang 2020, Kabupaten Cirebon telah mendapatkan capaian kinerja pada sektor kesehatan. Hilmi menerangkan, Kabupaten Cirebon telah menyandang status *Unity Health Coverage* (UHC) yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan karena memberi pelayanan kesehatan yang optimal.

Selain itu, geliat pertumbuhan ekonomi melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pun dinilai luar biasa. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon minus 1,08 persen. Namun UMKM warga tetap mampu menggenjot roda ekonomi.

Terakhir, selain kesehatan dan UMKM, ada pula sektor pertanian yang mampu bertahan dan stabil. Hal itu karena didukung komoditi pertanian di wilayah Ciayumajakuning yang baik sehingga tidak terganggu sekalipun pandemi.

“Pemkab Cirebon menginginkan Cirebon tetap menjadi lubang padinya Jawa Barat. Ditandai dengan geliat keinginan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Minimalnya 40.000 hektar diabdikan untuk sektor-sektor industri,” harapnya. •Sar

Catatan LKPJ 2020

Hasil pembahasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2020, DPRD Kabupaten Cirebon menyimpulkan beberapa SKPD belum optimal dalam mendukung visi misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD. Berikut beberapa diantaranya :

Sebagai penanggungjawab pembangunan pertumbuhan ekonomi, perlu adanya optimalisasi dalam pemanfaatan peluang bisnis yang ada untuk menggerakkan kembali roda perekonomian. Sehingga diharuskan pe-

ran Dinas Koperasi dan UKM untuk menciptakan strategi. Baik dalam hal manajemen, permodalan, sarana dan prasarana, pemasaran serta akreditasi.

Pengentasan kemiskinan juga masih harus menjadi pekerjaan rumah bidang kesejahteraan rakyat setda. Sebagai salah satu prioritas pembangunan di tahun 2020, angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon yang realitanya masih tinggi. DPRD Kabupaten Cirebon meminta, pemerintah harus segera membuat layanan terpadu di bawah komando satu dinas khusus menangani kemiskinan.

Kemudian, Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi

(Disnakertrans) pun juga perlu mengevaluasi pendampingan calon tenaga kerja saat pelatihan yang masih minim. Sehingga diharapkan mampu mempraktikkan hasil pelatihannya di lapangan. Selain itu, perlunya menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan.

Selanjutnya, DPRD Kabupaten Cirebon merekomendasikan Dinas Pendidikan agar menambah formasi tenaga pengajar. Jumlah guru dan kualifikasinya diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun dalam penyusunan anggaran suatu kegiatan harus dilakukan dengan realistis dan hendaknya menggunakan prin-

sip efisiensi.

Mengenai pelayanan kesehatan, masyarakat masih banyak yang mengeluhkan efektivitas puskesmas dalam layanannya. Untuk itu, tindakan preventif perlu ditingkatkan sehingga kepuasan masyarakat atas pelayanan puskesmas bisa meningkat.

Terakhir, pembangunan infrastruktur masih menjadi PR setiap tahunnya. Padahal realisasi pembangunan infrastruktur dinilai sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan sektor perekonomian masyarakat.

Mengejar Ketertinggalan dengan 8 Program Unggulan

Berbagai indikator menunjukkan Kabupaten Cirebon tertinggal. Untuk mengejar ketertinggalan, Pemkab Cirebon telah menyiapkan sedikitnya delapan program tahun ini. Apa saja?



Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Hilmy Rivai, mengungkapkan, ada 8 program kerja unggulan Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2021 yang sebagian merupakan kelanjutan dari realisasi program tahun sebelumnya.

Delapan program tersebut,

kata dia, Pemkab Cirebon akan membangun bank sampah di seluruh desa sebagai salah satu upaya menuju Kabupaten Cirebon Bersih. Sistemnya bisa melalui program pemberdayaan masyarakat atau bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hilmy menginginkan, seluruh desa bisa menyelesaikan persoalan sampah dengan mandiri.

“Banyak masyarakat yang mengeluhkan persoalan sampah di media sosial dengan menyebutnya darurat sampah. Sebenarnya bukan darurat sampah, hanya memang *mindset* sebagian masyarakat terhadap sampah itu baru membuang. Sekarang kita *meng-create* masyarakat supaya sampah itu bukan dibuang tetapi dikelola,” ujarnya.



Hilmy Rifa'i (Asisten Sekda 1)

Hilmy mencontohkan, Desa Sutiwinangun yang telah bergerak menggunakan bank sampah. Di desa tersebut, sampah non organik ditampung dan dikelola, kemudian dijual.

Selain itu, kata dia, Pemkab Cirebon akan membangun Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPAS) di banyak tempat. Tahun ini Pemkab Cirebon tengah menyiapkan TPAS di desa. Salah satunya di Desa Kubangdeleg, Karang Wareng, yang nantinya tidak hanya dijadikan TPAS, tetapi juga akan dikelola secara modern.

“Walaupun ini masih proses, Mudah-mudahan masyarakat

sekitar merasa tidak keberatan dengan adanya TPAS. Mudah-mudahan masyarakat rela menjual lahannya demi kepentingan pelayanan pengelolaan sampah,” harapnya.

Kedua, pembuatan e-KTP di kecamatan. Hilmy berharap melalui pelayanan e-KTP yang dapat dilakukan di kantor kecamatan akan mempercepat proses pembuatannya.

Sejauh ini, pembuatan e-KTP belum dapat dilakukan di kantor kecamatan, lantaran terbatasnya fasilitas printer akibat *refocusing* tahun lalu. Selain itu karena terbatasnya SDM. Karena itu ia manargetkan, pada tahap awal

fasilitas printer sudah ada di delapan wilayah tertentu. Berikutnya di setiap kecamatan.

“Saat ini kan harus ngantri di Disdukcapil. Itu kan bisa berhari-hari,” jelasnya.

Selain itu Pemkab Cirebon juga akan meningkatkan SDM di tingkat kecamatan dengan melatih cara pembuatan e-KTP.

“Bila perlu kita gunakan jasa anak-anak muda yang paham dunia IT. Walaupun catatan sipil sangat rahasia dan tidak boleh sembarang orang tahu, minimal teknis-teknis IT dikelola oleh yang ahlinya. Dengan catatan data sipil dipegang dan dikendalikan oleh Disdukcapil. Kita sedang menyiapkan. Mudah-mudahan tahun ini anggarannya tidak terkena *refocusing* kembali,” katanya.

Ketiga, Pemkab Cirebon juga akan membenahi jalan dan jembatan yang tahun kemarin tidak terealisasi lantaran *refocusing* untuk penanganan covid 19. Perbaikan jalan dan jembatan, kata dia, akan dilakukan pada triwulan kedua. Karena pada triwulan pertama masih dalam proses pengesahan dari DPRD dan menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.

Hilmy menuturkan, pada triwulan pertama anggaran *refocusing* 20 % dari jumlah yang ada. Jumlah tersebut lebih baik dari pada tahun lalu yang *refocusing* lebih dari 60 %. “Tahun kemarin persentasinya kecil, Sesuai dengan *refocusing* yang diam-bil. Misalnya 68 persen yang *refocusing*, berarti sisanya hanya 32 persen yang bisa dialokasikan untuk jalan,” tuturnya.

Keempat, Pemkab Cirebon akan menambah daerah wisata melalui program *one village one product tourism*. Setiap desa nantinya mempunyai produk wisata, baik wisata potensi alam, kuli-



ner, pendidikan, dan lain-lain. Tahun ini Pemkab Cirebon akan mengangkat 3 potensi wisata di tiga daerah yakni, Sedong, Dukupuntang, dan Ambulu.

Kelima, Pemkab Cirebon akan mewujudkan desa digital sebagai upaya membangun *smart city*. Melalui program ini, Hilmy berharap semua pelayanan dapat menggunakan sistem digital.

Hilmy mengungkapkan, ada sekitar 412 desa yang sudah tersambung dengan *viber optik*. Dengan begitu, desa-desa tersebut bisa menikmati layanan internet dengan kecepatan tinggi. Selain itu, kata dia, Bupati Cirebon Imron Rosyadi juga telah memberikan bantuan uang sebesar Rp 50 juta ke 145 desa untuk pemenuhan fasilitas digital.

“Mudah-mudahan bantuan di tahun ini jumlahnya sama, dan pemerintah desa bisa amanah untuk dibelikan sesuai kebutuhan digitalisasi desa,” ungkap Hilmy.

Keenam, Pemkab Cirebon akan membangun Mall Pelayanan Publik. Konsepnya pelayanan masyarakat akan terpusat dalam satu atap. Sehingga lebih mudah, cepat, dan transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengurus perizinan.

“Bupati sudah menyetujui akan ada pelayanan satu atap tahun ini. Sektor layanan di masing-masing dinas juga tengah disiapkan. Berhubungan dengan pendidikan ada dinas pendidikan, berhubungan dengan haji ada kementerian agama, dan lain-lain,” jelasnya.

Ketujuh, Pemkab Cirebon akan menganggarkan untuk pembangunan gedung Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Rencananya gedung ini akan dibangun pada 2022 mendatang. Tujuannya untuk memudahkan keluarga miskin di Kabupaten Cirebon dalam mendapat-

kan pelayanan.

“Seperti bagi yang tidak sekolah, rumah ambruk, tidak bisa bayar kesehatan, untuk mendapatkan pelayanannya tidak mesti ke Dinas Sosial dulu. Cukup datang ke SLRT, nanti akan mendapatkan pelayanan,” ujarnya.

Terakhir, Pemkab Cirebon akan memberlakukan *Single Data System (SDS)*. Sistem ini, terintegrasi untuk menyajikan data yang akurat, lengkap, akuntable, *up to date*, serta mudah diakses.

Pemkab Cirebon pun telah berkoordinasi dengan desa-desa di Kabupaten Cirebon. Agar sistem ini bisa berjalan dengan baik, Hilmy berharap seluruh desa bisa dijadikan sebagai pusat data informasi lokal, baik kemiskinan atau pun kesehatan.

“Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi ketidaksinkronan data warga miskin di kementerian, Dinas Provinsi maupun Dinas Kabupaten,” katanya. •Muiz



Penilaian dan Harapan Publik: Infrastruktur Terbelakang



Anwar Sadat S.Sos, M.Si
Camat/Mundu

Kondisi Kabupaten Cirebon saat ini sudah semakin maju dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terlebih, perihal sistem pelayanan yang semakin modern. Itu artinya ada perkembangan ke arah digitalisasi. Dan menurut saya, hanya pembangunan infrastruktur jalan yang masih harus menjadi perhatian khusus dalam pengembangan pembangunan ke depan. Karena jalan itu, sebagai akses utama baik menuju

ke pemukiman penduduk maupun menuju objek wisata.

Saya berharap untuk ke depannya, semua lini yang ada di Kabupaten Cirebon terus bergerak, terutama dalam membenahan infrastruktur agar menjadi skala prioritas kegiatan pembangunan kita. Bukan hanya persoalan jalan saja, tetapi semua sarana dan prasarana seperti gedung sekolah dan lain-lain.



Munir, S.Pd
PNS/Panganen

Sejak pandemi covid 19 sampai sekarang, keadaan Kabupaten Cirebon secara umum cukup kondusif. Dari segi perekonomian meski sempat bergejolak, namun saat ini sudah mulai ada peningkatan dan perkembangannya.

Dari segi pendidikan pun berkembang. Dalam situasi yang serba harus mematuhi protokol kesehatan, akhirnya mau tidak mau kita harus memanfaatkan kecanggihan te-

knologi untuk pembelajaran secara daring meskipun belum optimal. Selain itu, pemerintah juga sudah mengupayakan adanya vaksinasi untuk mencegah virus tersebut.

Harapan kedepan, Kabupaten Cirebon semoga tetap dan akan terus kondusif dengan menciptakan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga kita semua bisa menjalankan kegiatan dengan baik.



Saumi
Ibu Rumah Tangga
/Greged

Alhamdulillah, kondisi Kabupaten Cirebon sekarang ini saya rasa semakin baik. Dalam situasi pandemi, perekonomian masyarakat Kabupaten Cirebon banyak yang terbantu oleh adanya berbagai bantuan dari pemerintah. Pun mengenai BPJS yang lebih dipermudah.

Namun jika dilihat dari segi pendidikan sangat kurang karena aturan baru akibat pen-

데미. Sekolah tak mampu melakukan aktifitas pembelajaran yang maksimal. Selain itu, faktor lowongan pekerjaan juga dirasa sulit. Dengan banyaknya pabrik di Kabupaten Cirebon namun tak berbading dengan banyaknya para pemuda yang masih kesulitan mencari pekerjaan.

Saya berharap Kabupaten Cirebon ke depannya semakin lebih baik dalam memberikan jalan bagi kesejahteraan masyarakat.



Kyai Syahrudin
Tokoh Agama/Plered

Fasilitas infrastruktur terutama jalan di Kabupaten Cirebon banyak yang memprihatinkan dan rusak. Ini membuat suasana dan kondisi tidak nyaman. Karena roda distribusi maupun kegiatan ekonomi jadi terhambat.

Saya harap pemerintah Kabupaten bisa segera memperbaiki infrastruktur, terutama jalan harus mulus. Mulai dari Jalan nasional, kabupaten, ke-

camatan, desa sampai jalan di berbagai gang kecil.

Saya juga berharap sektor pariwisata di Kabupaten Cirebon pun diperbaiki, ditata senyaman mungkin. Terutama bagi keberlangsungan becak agar bisa beroperasi di sana. Contohnya memberdayakan di pasar batik yang dijadikan sentral parkir sehingga becak bisa mengantarkan para turis.



Supardi
Petani/Gebang

Kabupaten Cirebon termasuk wilayah yang selalu berkembang, dari segi kesehatan ataupun pendidikan. Bisa saya lihat dari beberapa puskesmas di wilayah timur Kabupaten Cirebon yang sudah menggunakan digitalisasi dalam pelayanan. Sementara dalam segi pendidikan juga dapat dirasakan semenjak masa pandemi. Beberapa lembaga pendidikan menggunakan daring dalam pembelajaran ataupun masa penerimaan siswa.

Hanya saja, satu yang saya rasa belum sepenuhnya diatasi, yakni persoalan infrastruktur. Karena masih banyak beberapa jalan di Kabupaten Cirebon khususnya wilayah timur yang sudah lama rusak tetapi belum juga ada tindakan perbaikan.

Mengingat sebentar lagi akan menghadapi hari raya, saya harap semoga bisa secepatnya ada tindakan dari pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menangani hal tersebut.



Wasnady
Seniman

Sejauh ini pemuda-pemudi Kabupaten Cirebon lebih banyak yang menyukai budaya luar seperti aliran musik barat dari pada budaya lokal seperti tari topeng.

Saya berharap generasi pemuda Kabupaten Cirebon semakin tersentuh terhadap kesenian tradisionalnya. Semoga Kabupaten Cirebon semakin *katon* dalam hal pelestarian budayanya.



Dr. R. Achmad Opan Safari Hasyim M.Hum
Budayawan

Ada banyak tokoh lokal terdahulu yang memiliki peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa, seperti Kiai Abbas Buntet, Ki Bagus Rangon dan lain-lain. Namun status beliau belum sampai

sekarang belum menjadi pahlawan nasional.

Saya berharap pemerintah Kabupaten Cirebon bisa mengangkat tokoh-tokoh lokal menjadi tokoh nasional.



Ahmad Afwan Anwarudin
Santri/ Astanajapura

Kondisi Kabupaten Cirebon sudah cukup baik, tapi bukan berarti sudah tidak butuh perbaikan sana-sini. Misalnya soal informasi baik dari sosial media dan website masih belum berjalan secara optimal. Terus masalah infrastruktur jalan juga masih belum segera

dibenahi.

Semoga ke depan hal-hal tersebut bisa segera direalisasikan secepat mungkin. Mengingat masyarakat butuh informasi kebijakan agar mampu menyampaikan masukan atau respon.



Ibrahim
Pedagang/Susukan Lebak

Menurut saya, Kabupaten Cirebon saat ini terasa seperti biasa. Artinya belum ada perubahan yang signifikan. Apalagi di masa pandemi covid 19 ini, untuk pedagang seperti saya. Namun banyak juga teman sesama pedagang saya, harus meminjam uang ke orang

agar modal usahanya tetap berjalan.

Harapan saya ke depan pandemi segera cepat teratasi. Karena dampak bagi kami selaku pedagang sangat terasa, penjualan sangat menurun drastis. Saya mengharapkan agar pemerintah dapat melihat permasalahan seperti ini.



M. Syukri Mubarok
Guru/Waled

Saya lihat Kabupaten Cirebon belum ada kemajuan. Ada banyak permasalahan yang belum dibenahi. Salah satunya masalah sampah dan *drainase* air, yang mengakibatkan banjir di beberapa daerah ketika hujan deras. Belum lagi jalan rusak yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Kemudian masalah pendidikan, di masa pandemi covid-19 ini saya rasa pemerintah daerah belum menemukan kebijakan yang lebih konkret. Metode daring belum membe-

rikan dampak baik untuk para siswa, malah sangat mempengaruhi sisi psiko sosialnya sehingga kemampuan berinteraksinya kurang.

Saya sangat berharap agar Pemkab Cirebon lebih responsif lagi dalam memandang permasalahan yang ada. Dan saya juga berharap agar pemerintah segera mengatur strategi atau menciptakan formula baru dalam mengajar di kala masa pandemi seperti ini. Agar kami sebagai guru dapat memudahkan anak-anak belajar.



Eka Fitriyani
Mahasiswa/Weru

Saya pikir kondisi Kabupaten Cirebon saat ini masih banyak PR yang harus dikerjakan sesegera mungkin, apalagi di masa pandemi covid-19 ini. Terutama dalam segi pendidikan dan infrastruktur jalan.

Saya berharap pemerintah dapat responsif mengenai problematika yang ada, karena

ini menyangkut agar Cirebon lebih baik lagi di masa mendatang. Terutama untuk infrastruktur jalan, di berbagai wilayah sudah sangat tidak layak. Kritik dari masyarakat yang menambal jalan merupakan tamparan keras untuk pemerintah agar cepat mengatasi permasalahan tersebut.



Dada
LSM/Palimanan

Meskipun saya bukan seorang pendidik, saya sangat memperhatikan keadaan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Yang saya sesalkan murid tidak boleh sekolah secara tatap muka langsung, sedangkan banyak pihak yang mengadakan perkumpulan-perkumpulan diperbolehkan.

Selain itu masih banyak juga persoalan lainnya, seperti keluhan masyarakat menge-

nai penanganan kesehatan, bantuan yang tidak tepat sasaran, pemungutan liar hingga data penduduk tidak mutakhir.

Harapan saya, Kabupaten Cirebon agar lebih *katon*, lebih bercahaya, lebih bersinar dan amanah. Baik pejabat dari eksekutif maupun legislatif semoga tetap berjuang untuk masyarakat, dan mampu menjadikan Kabupaten Cirebon yang lebih bagus dan maju.

Beri Usulan RKPD 2022

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, memaparkan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Serta memberikan masukan kepada Pemda dan SKPD pada RKPD tahun 2022.



foto-foto : Quasy/ik

DPRD Nilai LKPJ Bupati 2020

Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, berikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan pembahasan LKPJ Bupati pada tahun 2020.



foto-foto : Quasy/ik

Usul Fasilitasi Pengembangan Budaya



Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bapak/Ibu Dewan yang terhormat.

Saya Arif, Warga Desa Jamblang. Saya ingin mengajukan permintaan kepada Bapak/Ibu Dewan agar memperhatikan kami para budayawan dari Kecamatan Jamblang. Kami berencana untuk mengembangkan potensi sejarah di Vihara Jamblang. Setiap hari Minggu, kami selalu menggelar pentas seni di pelataran Vihara

Jamblang dengan tujuan melestarikan sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Cirebon. Saya harap Bapak/Ibu Dewan berkenan menyampaikan permintaan kami kepada pemerintah atau dinas agar dapat memfasilitasi kami.

Terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
Arif-Budayawan-Jamblang

Butuh Penampungan Air Bersih



Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bapak/Ibu Dewan yang terhormat.

Saya Jaya, warga Desa Mundu Pesisir. Saya ingin mengajukan permintaan kepada Bapak/Ibu Dewan agar membuat tempat penampungan air bersih di sekitar desa. Meskipun saya tinggal di daerah yang dekat dengan laut, tapi saat kemarau tiba, kami kekurangan air bersih. Apalagi untuk minum. Permintaan ini bukan hanya berlaku untuk Desa Mundu saja, saya lihat banyak masyarakat desa merasakan hal yang sama. Untuk itu, saya kira desa-desa lain pun perlu penampungan tersebut. Saya harap Bapak/Ibu Dewan berkenan menyampaikan permintaan kami kepada pemerintah atau dinas yang berkaitan soal ini.

Terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
Jaya(40)/Buruh/Mundu

Minta Tower Dirobuhkan

Assalamu'alaikum wr wb.

Saya Maulana, Warga RW 04 Desa Mulyasari Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Di dusun kami, berdiri BTS Tower sejak tahun 2006. Namun persoalannya sampai sekarang tidak ada kejelasan perihal surat perizinan. Selain itu kami juga tidak mendapatkan kompensasi. Padahal keberadaan tower tersebut, telah membuat resah warga selama ini. Tuntutan Warga sepakat tower diturunkan secepatnya. Apalagi pihak PT tidak ada itikad baik selama ini.

Sehingga kami menuntut tower provider milik PT Protelindo itu, untuk dirobuhkan. Kami telah meminta audiensi dengan PT Protelindo namun hingga sekarang tak pernah datang.

Mohon kiranya Bapak/Ibu dewan bisa mendengarkan aspirasi kami. Terimakasih.

Maulana(26) - Karang Taruna Mulyasari



Saran Program Pelatihan Life Skill

Assalamu'alaikum wr.wb

Salam hormat Bapak Ibu DPRD Kabupaten Cirebon. Perkenalkan saya Ricki, warga Desa Bodelor, Plumbon, ingin memberi saran kepada Pemkab Cirebon untuk mengadakan program pelatihan life skill untuk menunjang calon pekerja.

Seperti diketahui, saya merupakan lulusan SMK otomotif. Namun hingga sekarang saya belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusan saya. Saya berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat memfasilitasi para pemuda yang nantinya akan bekerja sesuai minat dan bakatnya. Walaupun saya tahu, sudah ada Disnaker yang telah membuat program pelatihan serupa. Namun menurut saya kurang optimal dan belum menjangkau seluruh kalangan. Terlebih kita akan mengalami bonus demografi tentu hal ini harus dipersiapkan oleh pemerintah kebijakan agar dapat menuai bonus demografi secara positif.

Terimakasih kepada Cirebon Katon berkenan menerbitkan.

Ricki(23) - Wiraswasta - Plumbon



Sekolah Alam Wangsakerta Tawarkan Konsep Vokasi dan Bertani

Tak butuh biaya. Sekolah Alam Wangsakerta ini menawarkan konsep pembelajaran yang berbasis keinginan.



Setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Agaknya penggalan kalimat di atas sangat relevan untuk menggambarkan ruang belajar bernama Wangsakerta ini. Wangsakerta merupakan sekolah alam yang berada di Blok Karang Dawa, Desa Setu patok, Kecamatan Mundu.

Bermula dari ruang diskusi antara mahasiswa dengan dosen. Mengenai pelbagai masalah seperti kemiskinan, pendidikan, gender, pangan hingga energi dalam lingkup Cirebon. Namun diskusi tersebut tak pernah menghasilkan aksi nyata apa-apa.

Farida Mahri, relawan pendiri Sekolah Alam Wangsakerta pun merasa jengah. Ia mengatakan kepada teman-temannya saat itu, jika diskusi saja hanya bersifat wacana maka percuma. Farida pun mem-

punyai inisiatif membuat ruang belajar yang bebas untuk masyarakat. Ia memilih wilayah tanah yang gersang dan mulai mengajak masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan formal untuk belajar.

"Awalnya kita ditawari beberapa lokasi untuk dipakai, seperti di Pamengkang. Tapi semuanya subur, kalau sudah subur sih terkesan gampang banget dan tidak ada pembelajaran. Sekolah ini kita buat untuk masyarakat yang putus sekolah maupun tidak mampu. Jadi kita pilih tempat yang jauh dari jangkaun orang-orang," kata Farida.

Setelah memutuskan untuk memilih tempat di Blok Karang Dawa, Desa Setupatok ini, Farida bersama dengan teman-temannya mencoba mendekati masyarakat, terutama kaum muda untuk bertani.



"Pelan-pelan saya berusaha mendekati masyarakat Karang Dawa dan saya melihat masih banyak anak muda disini tidak sekolah, tidak memiliki kegiatan dan masih melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat," bebarnya.

Ia juga menyampaikan ruang belajar atau sekarang orang menyebutnya Sekolah Alam Wangsakerta ini sangat berbeda dengan sekolah formal pada umumnya. Karena di Sekolah Alam Wangsakerta apa yang dibutuhkan maka itu dipelajari.

Sekolah Alam Wangsakerta lebih menekankan pada pembentukan karakter seseorang untuk menjadi jiwa pembelajar. Farida menilai, belajar itu bukan tentang nilai maupun ijazah. Tapi lebih kepada mencari solusi dan menemukan jawaban atas masalah

kehidupan yang ada di sekitar.

"Sekolah Alam Wangsakerta ini terbuka untuk siapapun yang mau belajar, tidak ada syarat khusus. Respon dari masyarakat di sini sangat bagus, mereka senang anak-anaknya ikut belajar. Kebetulan masih banyak anak di sini yang putus sekolah, Rata-rata lulusan SD tapi yang tidak lulus SD juga banyak. Namun yang ikut di sini hampir kebanyakan lulusan SD," tuturnya.

Tak hanya itu, di Wangsakerta tidak ada jenjang kelas. Tetapi setiap bulan mempunyai rencana pembelajaran dan itu semua berangkat berdasarkan kemauan individu masing-masing.

"Setiap bulan mereka mau belajar apa, misalnya ada yang mau belajar desain, menanam atau las. Terserah. Selagi fasilitas masih ada di sini. Namun setelah

itu, mereka harus mempresentasikan apa yang sudah dipelajari dan pelajaran apa yang mereka dapat," ucapnya.

Selain anak-anak yang putus sekolah, para mahasiswa pun tak sedikit yang ikut belajar bersama. Sekolah Alam Wangsakerta terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya sepeser pun.

"Kalau untuk siswa banyak ya, tapi tidak semuanya tetap 3 tahun di sini. Karena setiap bulan juga kita mempunyai event tematik, misalnya ada pembahasan tema pangan ya kita terbuka untuk semuanya. Namun yang konsisten full time ikut belajar itu dari masyarakat asli sekitar 20 siswa," katanya.

Semua pengajar di Sekolah Alam Wangsakerta pun merupakan guru profesional yang turut bersedia berbagi ilmunya jika dibutuhkan dengan tanpa bayaran. Semua yang jadi relawan itu para ahli dari mulai pertanian, seni budaya, periset dan lainnya.

Kini, Sekolah Alam Wangsakerta tersebut sudah berjalan 3,5 tahun. Farida mengaku berbagai kendala selama membangun telah ia lewati. Ia bekerja keras demi membuat Wangsakerta menjadi Sekolah alternatif bagi anak yang mau belajar untuk kemandirian desa.

Lulusan Sekolah Alam Wangsakerta diharapkan menjadi manusia pembelajar yang memiliki etos kerja tinggi dan memegang etik untuk berkiprah di masyarakat.

"Misi kita mencetak para pembelajar yang mau berupaya dengan sungguh-sungguh membangun desa. Konsep yang ditawarkan adalah murid belajar untuk kemajuan desa. Jadi apapun dipelajari di sekolah integral dengan kebutuhan desa," imbuh wanita yang memiliki hobi menulis dan bernyanyi ini. •lan



Pilu Petani di Musim Panen

Seorang petani di ujung desa, mengabaikan senyum sang surya karena harga padinya menurun.

Impor beras yang digadang-gadang pemerintah pusat, menjadi penyebab harganya anjlok.

"Biasanya saya jual Rp 430.000/Kwintal, tapi sekarang cuma bisa dapat Rp 320.000/Kwintal," ucap Sami, petani dari Desa Kreyo, Klenganan, yang telah puluhan tahun menggarap sawah.

Sami mengeluhkan, karena harga pupuknya yang mahal tak berbanding lurus dengan harga jual.

Sami menggunakan pupuk non subsidi dengan harga yang relatif mahal. "Ya, mau gimana lagi, yang subsidinya tidak ada," ujarnya.

Bagi Sami, dan petani lainnya, kesuksesan tidak diukur berdasarkan hasil panen yang melimpah, melainkan hasil kerjanya yang tetap dihargai. •Soy



Siska Karina : Saya Tidak Membatasi Diri Bertemu Masyarakat

Demi mengetahui kondisi riil masyarakat, perempuan berkacamata ini rela berkeliling hingga tengah malam. Bahkan, tanpa memperkenalkan diri sebagai anggota legislatif.



Foto: foto: Qusay/ck

Kenangan masa kecil yang ia lewati masih melekat tak terlupakan. Bersama dengan teman sebayanya kala itu, Siska kecil, sangat hobi bermain di air sungai yang tak jauh dari rumahnya. Dinginnya air sungai yang mengalir jernih, menjadi kawan karibnya tiap sore. Sebuah potret masa kanak-kanak yang bahagia.

Ia dikenal sebagai anak yang aktif dan mudah berkomunikasi sejak kecil. Maka tak heran, jika ia pun memiliki banyak teman.

Bahkan berkat kepiawaiannya dalam berteman, menjadi wasilah kesuksesannya terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Perempuan bernama lengkap Siska Karina itu memang menyukai jalinan pertemanan. Terlebih,

saat dirinya berada di jenjang pendidikan SMP dan menemukan kisah menarik dari hobinya membaca buku. Harry Potter, menjadi buku novel dan film bertema persahabatan favoritnya.

“Saking sukanya sama kisah perjalanan Harry Potter, dulu saya sampai dimarahin ibu karena sehari-harian cuma baca. Dari pagi sampe tengah malam, sehari saya bisa selesai baca novel itu. Setelah selesai, balik lagi baca lagi, kalau tayang di tv tonton lagi, sampe hafal,” kenangnya.

Tak heran, di dalam lemari bukunya, terjejer rapi berbagai novel Harry Potter, dari edisi pertama hingga edisi terakhir. Siska juga mengoleksi macam-macam *merchandise* karakternya. Salah satunya ialah syal Harry Potter yang sangat populer pada

masanya.

Menginjak usianya yang semakin dewasa, Siska mengawali karir dengan bekerja di sebuah bank. Hingga tujuh tahun kemudian ia memutuskan untuk berhenti karena telah memiliki empat orang anak.

Setelah tak lagi bekerja di bank. Salah satu rekan-nya mengajak Siska bergabung ke dalam salah satu sayap organisasi partai Golkar, bernama Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro).

Hingga tahun 2018, ia pun dipercaya untuk menjabat sebagai bendahara. Tak lama, setahun kemudian, saat memasuki masa pileg. Siska didapuk untuk masuk dalam jajaran anggota DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon dan dipercaya menjadi caleg di dapilnya.

“Padahal, awalnya tak terlintas sama sekali dibenak saya untuk terjun ke dunia politik,” ucapnya.

Ia pun menerima dan mulai membuktikan keseriusannya. Dengan dinamika yang luar biasa pada saat pencalonan, Siska bersama teman-teman perempuan sejawatnya, mulai berjuang untuk mendapatkan suara.

“Karena, pada saat itu kuota perempuan harus memenuhi syarat 30 persen di setiap dapilnya. Jadi kita berjuang keras,” jelasnya.

Tak sia-sia, Siska pun terpilih, dan dilantik menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Cirebon dan menempati anggota Komisi IV.

“Walaupun *basic* saya di bank, tetapi *basic* keluarga saya di pendidikan. Sedikitnya saya paham dengan dasar-dasar mitra kerja komisi IV,” terangnya.

Selama menjadi anggota dewan, Siska berusaha keras agar tidak melewatkan setiap agenda rapat. Baginya, ia adalah seorang politikus baru yang harus banyak belajar. Ia juga tak pernah malu bertanya soal apapun, pada siapa saja selagi berada dalam *track* yang benar.

Keseriusan dan ketelatenan Siska dalam perannya menjadi wakil rakyat pun mendapat nilai lebih dari ketua komisi IV saat itu. Alm H Rasida, selalu mengajak Siska untuk mengikuti rapat pimpinan.

Tidak ada yang pernah tau usia seseorang. Sebulan kemudian, Ketua Komisi IV H Rasida wafat. Kondisi seperti itulah yang tak sengaja membuat posisi ketua komisi IV kosong selama beberapa waktu.

Siska, akhirnya dipercaya oleh ketua partai untuk mengisi kekosongannya hingga saat ini. Setelah dilakukannya musyawarah aklamasi seluruh anggota komisi IV.

Berkecimpung dalam dunia politik membuat mata Siska terbuka lebih lebar. Wawasannya pun semakin luas. Ia dapat melihat langsung berbagai



kondisi masyarakat yang ditemuinya. Apalagi, saat masa kampanye dimulai hingga masa reses.

Tanpa memperkenalkan diri sebagai anggota dewan, Siska seringkali melakukan komunikasi dengan masyarakat, baik di dapilnya sendiri maupun di luar dapil. Menurutnya, itulah salah satu cara mengetahui kondisi riil mereka.

Bahkan, dengan menggunakan sepeda motor-nya, Siska rutin berkeliling seminggu dua sampai tiga kali hingga tengah malam. Untuk memantau keadaan warga di salah satu dapilnya sendiri, Kecamatan Talun. Menyapa warga yang sedang nongkrong maupun menjenguk warga sakit.

“Saya tidak membatasi diri bertemu masyarakat, dengan melihat kondisi masyarakat bagaimana dan ngobrol. Jadi saya pribadi tahu kedepannya, kebijakan seperti apa yang harus dibuat oleh kita,” tandasnya. •Sar

Abdul Rohman: Hobi Bertani, Jadi Sarana Dekat Masyarakat

Tak takut kotor. Lelaki satu ini terbiasa bergelut di lumpur. Hobinya berorganisasi hingga bertani. Bagaimana kisahnya?

Setiap libur bekerja, lelaki satu ini selalu menyempatkan waktu untuk menanam padi di sawah miliknya. Sokok satu ini memang tak anti pati dengan kehidupan desa. Tak takut kotor. Berbanding terbalik jika ditemui saat bekerja di kantor.

“Takut kotor itu bukan tipe saya. Jadi, bagi saya tidak bermasalah mengisi waktu luang dengan bertani,” ucapnya menegaskan.

Lelaki pemilik nama lengkap Abdul Rohman ini, merupakan anggota DPRD Kabupaten Cire-

bon dari Fraksi PDIP. Ia juga menjabat sebagai ketua komisi I membidangi pemerintahan.

Pria berusia 51 tahun itu, layak menjadi teladan bagi kebanyakan orang. Berbekal menjadi seorang petani, Rohman merasa lebih dekat dengan masyarakat. Ia pun selalu tanggap dalam merespon keluhan maupun aspirasi para warga.

“Dalam melaksanakan kinerja dewan, kita membutuhkan perencanaan sebelum melaksanakan program. Dan saya memilih sawah menjadi salah satu tempat sarana untuk membahas program bersama dengan masyarakat,” ungkapnya.

Selain hobi bertani, komandan Rohman, sapaan akrabnya juga dikenal aktif berorganisasi. Menurutnya, dengan berorganisasi membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik dan banyak belajar. Ia memiliki prinsip, manusia harus banyak belajar dan memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Awal mula ia bergelut di organisasi bermula saat duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI Kecamatan Karangsembung. Ia mengikuti Organisasi Intra Sekolah (OSIS). Be-

“

saya memilih sawah menjadi salah satu tempat sarana untuk membahas program bersama dengan masyarakat

”

ranjak dewasa, ia bersama teman-temannya masuk ke dalam roda organisasi Karang Taruna Desa Sarajaya.

Banyak kegiatan yang dilakukan Rohman, maupun yang ia ikuti selama aktif di Karang Taruna. Mulai dari bakti sosial, festival sholatat hingga lomba olahraga.

Kecintaannya terhadap organisasi pun tak berhenti sampai situ. Beranjak di usianya yang ke 19 kala itu, ia mulai masuk organisasi Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Salah satu dari organisasi kepanjangan Nahdlatul Ulama di kalangan pemuda.

Seiring berjalannya waktu, ia bahkan diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Komandan Satuan Koordinasi Cabang Banser GP Ansor Kabupaten Cirebon.

“Saya bangga menjadi kader Banser Kabupaten Cirebon. Pada 2014 lalu saya ditunjuk oleh beberapa kiai di Kabupaten Cirebon agar mau menjadi Komandan Banser Kabupaten Cirebon.



Beliau menunjuk saya kaarena menurutnya, saya orangnya aktif dan mumpuni,” ungkapnya.

Tak hanya berorganisasi dan bertani, saat kecil dulu, Rohman juga hobi berolahraga. Terutama bermain bola voli. Semangat dan optimisme selalu ia tunjukkan dalam setiap berlatih ataupun bertanding. Alhasil, berbagai prestasi telah ia raih selama menjadi pemain bola voli, dari tingkat lokal maupun daerah.

Rohman menceritakan, saat muda dulu, ia termasuk bagian tim utama bola voli daerah Kabupaten Cirebon. “Dulu saya juga berprestasi di cabang olahraga voli. Bahkan pada 2002 lalu, saya ikut mewakili tim voli Kabupaten Cirebon dan menjuarai turnamen voli tingkat Jawa Barat,” kenang Rohman.

Berangkat dari semangat itu pulalah yang mengantarkan Rohman menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Rohman mengawali karir masuk poli-

tik karena didorong oleh masyarakat, termasuk teman-teman seperjuangannya di organisasi.

“Pada pemilu tahun 2019 lalu, saya didorong oleh teman-teman organisasi saya secara khusus, dan masyarakat secara umum untuk maju di bursa pemilu legislatif DPRD. Saya ditunjuk oleh partai PDIP untuk maju. Alhamdulillah baru pertama kali saya diamanahi dan terpilih,” ucapnya.

Meski demikian, Rohman mengaku, menjadi wakil rakyat bukanlah merupakan kebanggaan. Melainkan sebuah tanggung jawab melayani rakyat. Rohman pun bertekad akan terus mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menjalankan kinerjanya. Sebab ia lebih suka memimpin dengan gaya akomodasi, bukan intruksi.

“Selama berorganisasi saya lebih suka mengedepankan musyawarah dan mufakat dengan gaya berbicara yang lemah lembut,” pungkasnya. • **Muiz**

Dua Raperda Eksekutif Disetujui

Bupati Cirebon menjawab usul dan saran DPRD terhadap 2 raperda pada paripurna sebelumnya. Ia pun memberi alasan kenapa 2 raperda menjadi skala prioritas.



foto: foto: Quany/dk

Wakil ketua DPRD Kabupaten Cirebon Rudiana mengetuk palu sidang sebagai tanda telah dibukanya rapat paripurna. Kali ini, dalam rangka penyampaian jawaban Bupati Cirebon atas pemandangan umum fraksi DPRD terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda).

Sebagaimana telah disampaikan, pada rapat paripurna sebelumnya mengenai hantaran raperda. Masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Cirebon telah memberikan pandangan umum, usul dan saran mengenai Perda Ketertiban Umum dan Desa.

"Kami menyambut baik apresiasi DPRD Kabupaten Cirebon terhadap pengajuan dua raperda melalui tanggapan, saran dan masukan di rapat sebelumnya," kata

Bupati Cirebon Imron Rosyadi.

Imron menyampaikan, raperda perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam menertibkan masyarakat di masa pandemi covid 19.

Hal itu juga tertuang dalam ketentuan pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang mana pengaturan sanksi pidana dan administratif atas penegakan hukum penerapan protokol kesehatan hanya dapat diatur dalam perda.

Sanksi tersebut akan diberikan apabila terjadinya pelanggaran. Antara lain sanksi sosial berupa membersihkan fasilitas umum, sanksi pidana maupun administratif.

"Apabila denda administratif dipandang memberatkan, mohon kepada DPRD agar dapat dikaji lebih lanjut dalam rapat panitia khusus (pansus)," harapnya.

Selanjutnya, dalam melaksanakan urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Imron mengatakan telah menetapkan target peningkatan. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), berupaya menurunkan tingkat penyakit masyarakat, kriminalitas dan konflik sosial.

Sementara persoalan mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Imron mengaku, pemerintah daerah telah melakukan beberapa kali penertiban dan rehabilitasi kepada yang bersangkutan.

Dalam rapat paripurna terse-

but, Imron juga menyampaikan peraturan daerah tentang desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, pemerintah daerah telah mengundang empat perda sesuai arahan. Pertama, pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan. Kedua, penetapan desa. Ketiga, kebijakan pelaksanaan pemilihan kuwu serentak. Dan keempat, persyaratan calon kuwu, BPD dan perangkat desa. "Persyaratan calon kuwu diatur dalam perda sesuai undang-undang, peraturan pemerintah dan muatan lokal perda. Salah satunya kuwu harus berbadan sehat," jelas Imron.

Sementara pelaksanaan pemilihan kuwu serentak mendatang, pemerintah daerah telah melakukan beberapa persiapan. Di antaranya pendataan penduduk dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), persiapan anggaran, dan rapat tim pembuatan rancangan regulasi pemilihan kuwu serentak.

"Monitoring dan evaluasi oleh tim monev pun tetap dilaksanakan pada saat pemilihan, untuk meminimalisir permasalahan dan kecurangan," ujar Imron.

Pelaksanaan pemilihan kuwu serentak di masa pandemi, kata Imron, merujuk pada aturan Kemendagri Nomor 72 tahun 2020. Yakni menjalankan beberapa ketentuan dalam mencegah penyebaran virus covid 19. Diantaranya, melakukan pembatasan jumlah pemilih di setiap TPS maksimal 500 orang Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Penerapan protokol kesehatan juga akan diperketat, meliputi pengukuran suhu tubuh, penggunaan alat pelindung diri atau masker dan penyediaan tempat sampah tertutup. Selanjutnya,



tidak berjabat tangan, menghindari kerumunan, penyediaan tempat cuci tangan dan hand-sanitizer.

"Panitia dan pemilih juga membawa alat tulis masing-masing. Sebelum pelaksanaan, akan dilakukan penyemprotan disinfektan dan penataan letak duduk berjaga jarak. Pun, penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat," terangnya.

Imron mengatakan, undang-undang tentang desa juga mengatur pembentukan peraturan bupati mengenai aset desa, keuangan dan lembaga kemasyarakatan di desa. Demikian pula pengaturan kewenangan BPD.

"BPD turut berperan menye-

pakati peraturan desa mengenai APBDesa dan pertanggungjawaban realisasinya. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kemendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa," tambahnya.

Melalui raperda ini, kata Imron, penggunaan metode berbasis teknologi pemilihan kuwu serentak diatur untuk periode berikutnya. Antara lain melalui *e-voting*.

Berbagai tanggapan, pertanyaan, usul, saran dan himbauan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon sebelumnya pun telah dijawab Bupati. Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan nota kesepahaman. •Sar

Temuan Kekurangan Pajak Parkir

BT Batik Trusmi mendapat omzet sektor parkir sekitar Rp 48 juta rupiah. Namun, kontribusi pajaknya hanya Rp 700 ribu.



foto: foto: Quasoy/da

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon meninjau Pusat Grosir BT Batik Trusmi. Kunjungan tersebut dalam rangka mengawasi manajemen parkir Batik Trusmi yang dilakukan vendornya, PT Skiland.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon R Cakra meminta, kepada BT Batik Trusmi untuk memaparkan omzet parkir per Januari hingga Maret 2021.

"BT Batik Trusmi memiliki jumlah pengunjung yang banyak dan lahan parkir yang luas, kita ingin mengetahui berapa omzetnya," ujarnya.

Kordinator Parkir BT Batik Trusmi Santono menjawabnya.

Per Januari lalu, pemasukan parkir BT Batik Trusmi sebanyak Rp 16.973.000, Februari senilai Rp 13.068.000 dan Maret sebesar Rp 18.228.000.

Kemudian, R Cakra meminta kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Cirebon untuk menjelaskan sejauh mana kontribusi pajak parkir yang dilakukan PT Skiland.

Kepala Sub Bidang Pajak Parkir dan Perhotelan Bappenda Kabupaten Cirebon mengatakan, kontribusi pajak yang diterima dari PT Skiland pada bulan Januari dan Februari, sebesar Rp. 350.000 ribu. Sedangkan untuk

Maret PT Skiland belum melaporkan.

Melihat hal itu, R Cakra menilai adanya temuan dugaan kekurangan pembayaran pajak parkir yang dilakukan PT Skiland. Padahal berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang penetapan Wajib Pajak (WP), perusahaan wajib membayar pajak 25 persen dari keseluruhan omzet yang ada.

"Ini telah menyalahi Perda. Seyogyanya pajak itu 25% dari omzet. Tapi dalam praktiknya kurang dari 25%. Nilai setoran yang dilakukan PT Skiland per Januari sampai Maret hanya Rp 700 ribu," tegas Cakra.



Ia pun menyangkan potensi BT Batik Trusmi sebagai magnet wisata sandang Kabupaten Cirebon. Menurutnya, dengan luas lahan parkir dan banyaknya pengunjung, seharusnya mampu memberikan menghasilkan banyak PAD bagi kas daerah. Namun kontribusi pajaknya tidak berbanding lurus dengan omzetnya.

R Cakra menerangkan, APBD

Kabupaten Cirebon tahun lalu mencapai hampir Rp 4 triliun. Namun masih jauh panggang dari api nilai PAD yang hanya kurang dari Rp 1 triliun. Artinya, pengeluarannya lebih besar dari pemasukan. Untuk itu Ia pun meminta kepada BT Batik Trusmi agar tertib dalam membayar pajak.

"Mudah-mudahan lewat pa-

jak retribusi perdagangan dan pajak parkir dapat memaksimalkan pemenuhan pembangunan Kabupaten Cirebon," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Hanafi menanyakan perkembangan pemasangan tappingbox di BT Batik Trusmi. Kasubid Parkir dan Perhotelan Bappenda Kabupaten Cirebon mengatakan, tapping sudah terpasang namun masih terkendala teknis.

Sementara ini, kata dia, pengawasan wajib pajak (WP) melalui *tapping box* untuk parkir masih belum terpantau dan terdeteksi. Hal tersebut lantaran masih belum terkoneksi antara *tapping box* dengan perangkat IT. Itu dikarenakan masih ada perbedaan dengan aplikasi yang dimiliki BT Batik Trusmi.

"Antara *tapping box* kita dengan alat aplikasi yang dimiliki PT untuk parkir ini masih ada sedikit perbedaan. Sehingga harus disinkronkan. Datanya harus masuk ke server kita," jelas Hanafi.

Hanafi pun meminta agar tapping box di BT Batik Trusmi bisa secepatnya beroperasi. Jangan sampai berlarut. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pungutan PAD maupun kas daerah.

Menanggapi hal itu, Kasubid Parkir dan Perhotelan Bappenda Kabupaten Cirebon berjanji, akan terus berkordinasi dengan BT Batik Trusmi tentang sinkronisasi alamat IT. Dengan begitu, data transaksi bisa secepatnya terekam dan dapat dilihat di *dashboard* tappingbox.

Sidak ini, dihadiri General Manager (GM) BT Batik Trusmi Arif, Kordinator Lapangan Parkir BT Batik Trusmi Santono, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Cirebon. •Muiz

Perlu Penambahan SDM Nakes

Komisi I menilai perlu penambahan SDM dokter di RSUD Arjawinangun Cirebon dengan memfasilitasi pendidikan bagi putra-putra terbaik oleh Pemkab Cirebon.



Foto: Foto: Lamula

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun dalam meninjau kepegawaian. Dalam kunjungan tersebut, hadir Direktur RSUD Arjawinangun Bambang Sumardi.

Bambang memaparkan, jumlah seluruh pegawai yang dimiliki RSUD Arjawinangun, sebanyak 853 orang. Terdiri dari ASN yakni, PNS dan P3K, pegawai tetap badan layanan umum daerah (BLUD) sebanyak 378 orang dan pegawai tidak tetap bersumber dari APBD sebanyak 57 orang.

Ia mengaku telah mengang-

kat tenaga honorer pada bulan lalu menjadi pegawai tetap. Hal itu merupakan amanat Permendagri No 79 tahun 2018.

"Sesuai dengan amanat Permendagri, apalagi ini di masa pandemi kita butuh banyak tenaga kesehatan. Jadi harus ada remunerasi dan itu diberikan hanya bagi pegawai BLUD," paparnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Abdul Rohman, pun menyoroti mengenai kondisi bagi pegawai tetap BLUD maupun jumlah pegawai yang belum ditetapkan setelah pandemi berakhir.

Menanggapi itu, Bambang mengatakan jika semua keputu-

sannya mengenai pengangkatan telah sesuai dengan peraturan bupati (Perbup). Menurutnya, semua yang telah diangkat sebagai pegawai tetap BLUD maupun yang tidak, akan dipekerjakan hingga usia pensiun mendatang.

"Jadi sampai kapanpun selama Perbup masih berlaku dan telah dijelaskan masa pensiunnya sampai umur 56 tahun, ya tetap bekerja," jelas Bambang.

Selain mengangkat pegawai sebagai pekerja tetap, Bambang juga menjelaskan telah melakukan langkah untuk menjaga kestabilan para pegawai dengan memberikan pendidikan lanjut maupun kenaikan upah kerja.



"Kalau dokter umum ASN yang ingin melanjutkan sekolah kita bolehkan. Karena dipastikan akan balik lagi. Kita juga memberi kenaikan honorer bagi dokter spesialis yang awalnya hanya Rp 2,7 juta menjadi Rp 5 juta. Bahkan ada yang mencapai Rp 10 juta," ungkapnya.

Selain itu, Bambang me-

nyampaikan ada 4 tuntutan dari pegawai yang harus selalu direalisasikan oleh RSUD Arjawinangun yaitu, keamanan, kenyamanan, kepastian dan kesejahteraan.

"Kita baru mampu melakukan 3 point. Jadi untuk kesejahteraan kita berharap pemerintah mampu memperhatikan," ujar Bambang.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Hasan Basori, menyampaikan pendapatnya mengenai pentingnya penguatan sumber daya manusia pada RSUD Arjawinangun.

"Di Kabupaten Cirebon cukup banyak penduduknya. Sehingga rasio kebutuhan dokter juga harus lebih banyak tentunya. Belum lagi kalau bicara dokter spesialis yang minim. Kami memberi masukan agar pemerintah daerah harus memberi ruang bagi putra terbaik, ASN maupun tenaga medis yang ingin melanjutkan pendidikan kesehatan lanjutan," jelas Hasan.

Hasan mengapresiasi, atas kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran RSUD Arjawinangun dalam membangun sikap profesionalisme yang diukur dalam kepastian, transparansi dan keadilan.

"Misalnya masalah pegawai yang awalnya kontrak 2 kali. Setelah itu diangkat menjadi pegawai tetap," jelasnya.

Namun, ia menyayangkan terhadap citra RSUD di mata masyarakat yang dianggap tempat pilihan terakhir.

"Realita sekarang, RSUD dianggap kalau sudah tidak ada tempat lagi baru mau ke sini," tegasnya.

Padahal sejauh ini, RSUD Arjawinangun memiliki keunggulan dari RSUD lainnya. Yakni telah memiliki ruang perawatan jiwa. Tidak hanya itu, RSUD Arjawinangun juga memiliki dokter ahli bedah saraf yang menjadi rujukan di wilayah 3.

"Mudah-mudahan ke depan dapat dikembangkan lagi spesialisnya. Dan pelan-pelan kita akan merubah brand RSUD, agar menjadi rujukan pertama," pungkas Bambang. •lan

Rumuskan Perubahan RPJMD

Bupati Cirebon memaparkan perubahan RPJMD di hadapan seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon dalam rapat paripurna. Ada 10 isu strategis yang menjadi indikator perubahan.



Foto: Foto: Qusey/dk

Siang itu, seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Cirebon mengadakan rapat paripurna, guna membahas perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 yang diusung oleh Bupati Cirebon Imron Rosyadi.

Imron menyampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon jika perubahan tersebut, sesuai dengan apa yang sudah tertuang dalam undang-undang.

Perubahan RPJMD setidaknya mengacu pada UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Diamiatkan pula dalam pasal 342 ayat (1) huruf C, Permen-

dagri Nomor 86 tahun 2017 yang berbunyi RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar.

“Perubahan mendasar yang dimaksud mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah dan perubahan kebijakan nasional,” katanya.

Ia juga memaparkan mengenai penyusunan dan pengajuan rancangan Perda tentang RPJPD dan Perda RPJMD.

“Pembahasan bersama DPRD Kabupaten ini sudah diamanatkan dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Ini merupakan agenda strategis dalam rangka penajaman, penye-

larasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan dan program pembangunan daerah 5 tahunan yang sudah tersisa 3 tahun anggaran,” tuturnya.

Selain itu, ia berharap 3 tahun yang akan datang bupati dan wakil bupati serta seluruh jajaran pemerintahan dapat segera mengimplementasikan visi dan misinya sebagai target utama. Tentu melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah.

“Dalam rangka melaksanakan setiap program dan kegiatan diperlukan langkah strategis dengan menyusun cara, langkah atau tahapan untuk mencapai tujuan. Karena pengelolaan pembangunan daerah memerlukan manajemen strate-

gis untuk menetapkan tujuan pemerintah daerah, melalui pemberdayaan dan mengoptimalkan setiap potensi sumber daya yang ada,” tegasnya.

Ia pun menerangkan, isu strategis Kabupaten Cirebon untuk tahun 2022 sebagaimana tercatat dalam Bappelitbangda.

Pertama, Reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta pengawasan bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kinerja.

Kedua, pengelolaan sumber daya manusia sebagai mata rantai pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Ketiga, kualitas sumber daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Keempat, pembangunan ekonomi kerakyatan utamanya yang terdampak pandemic covid-19. Kelima, penyediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kemudian, isu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, penanganan pandemi covid-19 dan dampak-dampaknya, peningkatan pariwisata berbasis budaya lokal Cirebon, penguatan generasi milenial sebagai bonus demografi dengan inovasi dan kreativitasnya. Terakhir, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis inovasi.

“Keseluruhan point, tersebut merupakan indikator yang mendorong perubahan RPJMD dalam membaca isu tahun depan,” ujar Imron.

Meski begitu, ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi kalau ingin sampai pada tahap penetapan dokumen perubahan RPJMD menjadi Peraturan Daerah. Hal itu sebagaimana pasal 67 dan 68 Permendagri No 86 tahun 2017.

“Peraturan tersebut berisi Bappelitbangda harus menyampaikan rancangan akhir perubahan RPJMD yang dimuat da-



lam raperda tentang perubahan RPJMD kepada sekretaris daerah dan bagian hukum untuk melakukan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan raperda. Paling lambat 5 hari setelah pelaksanaan Musrenbang perubahan RPJMD,” jelas Imron.

Imron pun sangat berharap dengan adanya perubahan tersebut bisa dinilai sebagai awal untuk menuju tercapainya visi misi Cirebon. Ia pun menghimbau kepada seluruh perangkat

daerah Kabupaten Cirebon agar senantiasa melayani rakyat dengan sepenuh hati, juga mengutamakan kepentingan masyarakat. Bekerja tanpa pamrih, *Rame Ing Gawe Suci Ing Pamrih*.

“Saya berharap dokumen perubahan RPJMD ini lebih berkualitas dan mampu mengkomodasi seluruh kepentingan masyarakat sehingga dapat diimplementasikan guna menuju Cirebon kerja bersama sebagaimana yang dicita-citakan,” tandasnya. •lan

Mangrove Mina Citra Lestari Berniat Tangkal Abrasi, Ciptakan Ekowisata Memikat Hati

Bermula karena abrasi. Keindahan ekowisata mangrove ini didirikan, namun siapa sangka justru menjadi potensi wisata yang siap mendongkrak PAD.



foto: foto: Quosoy/ik

Udara pantai bercampur tanaman dan teduhnya hutan mangrove sangat terasa ketika memasuki area ini. Angin yang menghembus membawa udara sejuk dan panas khas pesisir pun menerjang kulit. Tawaran suasana tenang, meski sesekali bunyi mesin perahu serta gemericik air yang terkena kipas perahu, kerap terdengar di antara rerimbunan hutan mangrove.

Suasana ini bisa dinikmati saat berkunjung di pantai Desa Grogol, yang terletak di sebe-

lah utara Kecamatan Gunungjati. Pasalnya, desa ini memiliki keindahan pesisir yang telah dimanfaatkan dengan budidaya mangrove bernama Mina Citra Lestari (MCL).

Purwadi, Ketua Kelompok Pengawasan Masyarakat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sekaligus penggagas Mangrove MCL menceritakan awal mula pendirian wisata itu. Bermula saat air laut mengalami abrasi di desanya akibat penggundulan tanaman di bibir pantai. Ia pun tak tinggal diam. Bersama

kawan-kawannya, Purwadi mulai merencanakan penghijauan dengan mencari bibit mangrove.

"Tahun 2001 saya mengajak kawan untuk menyadarkan pentingnya merawat alam. Saya mencari bibit di tempat yang kaya akan mangrove seperti Indramayu, Tegal, Brebes. Saya mencari kelopaknya kemudian kita tanam terutama di pinggiran sungai," ucapnya.

Selang 4 tahun, harapan dan kerja keras Purwadi bersama kawan sejawatnya, akhirnya terbayarkan ketika tahun 2005



Mangrove MCL resmi didirikan. Ia pun mulai mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga alam dan tanaman.

"Kita mengedukasi masyarakat dengan himbauan 3 jenis W untuk diwaspadai. Yang pertama itu *Wong* (manusia), mereka biasanya lupa apalagi orang yang lagi menjala. Kemudian *Wedus* (kambing), kadang ada yang menggembala kambing dan merusak tanaman. Terakhir, *Wideng*, yaitu kepiting, hewan yang sering memakan bibit mangrove muda, disebut sebagai hama," jelasnya.

Berbagai kendala pun dihadapi selama membangun Mangrove MCL. Dari mulai laut mengalami abrasi kembali, hingga orang yang berpura-pura mengakui kepemilikan mangrove tak membuat patah semangat bagi Purwadi. Ia tetap konsisten merawat Mangrove hingga sekarang.

"Sejak 2010 saya sudah mempunyai konsep kalau mangrove ini akan menjadi wisata bahari. Meski sekarang masih tahap

pembenahan," ungkapnya.

Selain mangrove, Pak Pur, sapaaan akrabnya, berencana akan membuat destinasi berupa kuliner khas laut, seperti kerang hijau, pepes ikan dan ikan asin. Sehingga, selain menghadirkan wisata, namun nantinya juga akan membantu perekonomian warga sekitar.

Selain itu, Mangrove MCL juga berencana akan membangun sarana bagi para wisatawan agar lebih nyaman saat berkunjung. Juga akan menjadi media pembelajaran bagi para pelajar, mahasiswa maupun kegiatan bakti sosial yang bertema penghijauan.

Selama membangun mangrove, Purwadi, menempatkan hasil di posisi terakhir. Yang utama adalah aksi. Karena menurutnya, dalam membangun suatu kepercayaan itu harus didasari dengan penuh ketekunan, pantang menyerah dan yang paling penting ketulusan.

"Alhamdulillah sekarang kita sudah dilirik oleh peme-

rintah, kemarin bantuan dari provinsi papan untuk jalan sekitar 50 meter. Pemerintah Pusat juga rencananya tahun ini akan membantu 140 meter. Kemudian Pemdes Grogol pun sedang membuat Perdes tentang pengelolaan wisata bahari. Kalau ada orang mau bantu pun kita persilahkan," terangnya.

Untuk menikmati wisata Mangrove MCL, para pengunjung tak perlu khawatir karena sejauh ini belum ada patokan harga tiket masuk. Para pengunjung hanya dikenakan biaya parkir seadanya.

"Kita masih belum berani menentukan harga tiket masuk karena masih belum sempurna 100 persen. Jadi kalau untuk biaya operasional dan perawatan mangrove, kita mengandalkan dari uang parkir tapi itu pun tidak dipatok. Uang hasil parkir tersebut kemudian dihimpun untuk membayar K3 dan MCK, karena air bersih belum masuk," jelas Pak Pur.

Pria berumur 67 tahun itu, juga sangat berharap pemerintah dapat membantu dalam merealisasikan pembangunan wisata Mangrove MCL yang ramah lingkungan. Karena ia begitu optimis, destinasi wisata ini akan sangat membantu dalam mendongkrak sektor perekonomian maupun PAD.

"Untuk saat ini saya cuma pengen 3 hal. Pertama jalan, karena akses menuju ke sini kan lumayan parah jalannya. Kedua, air bersih. Saya kadang malu sendiri, ketika pengunjung ke sini terus airnya berwarna kuning. Kemudian yang terakhir, listrik. Kita juga sedang berusaha untuk kerjasama dengan Bumdes, agar nantinya dapat menambah pendapat desa," tandasnya.

Palir

Ciptakan Ekonomi Mandiri

Desa Palir memiliki persawahan yang masih asri dan belum tersentuh perusahaan maupun industri. Ini salah satu strategi yang dibuat untuk menjaga ekonomi mandiri.



Durakman (Kepala Desa Palir)

Hamparan sawah yang asri mengelilingi pemukiman warga. Tampak tumbuh padi yang menguning, timun, bayam hingga bengkoang memadati ladang di desa ini. Pemandangan ini berada di Desa Palir, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon yang merupakan sebuah kampung mandiri. Sekira 50 hektar persawahan dikelola oleh masyarakat asli.

“Warga di desa kami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masih mengandalkan potensi sumber daya yang ada. Jadi

mayoritas warga kami itu petani. Karena di desa kami masih banyak tanah milik pribadi. Bahkan belum ada yang terjual oleh industri maupun perusahaan,” jelas Durakman, Kuwu Desa Palir.

Dalam menggarap sawah, masyarakat pun, kata Durakman, tak sampai berhektar-hektar. “Paling dalam 1 keluarga biasanya satu hingga dua hamparan. Paling sedikit setengah bahu,” terangnya.

Durakman pun melihat potensi pertanian ini akan membantu pemerintah Kabupaten

Cirebon dalam menjaga ketahanan pangan.

Sementara pendapatan asli desa (PAD), Durakman mengaku, Desa Palir hanya mengandalkan titisara sekira Rp 15 juta per tahun. Hal itu disebabkan, pemasukan tanah titisara lebih banyak untuk membenahi infrastruktur desa, GOR hingga mushola. Selain itu ia telah mengalokasikannya untuk membuat embung air, sebagai persiapan jika dihadapkan oleh musim kemarau.

Ia pun berencana akan membangun kios untuk menambah pundi-pundi PAD ke depannya yang nantinya bisa disewakan khususnya untuk masyarakat desa.

“Kita akan bikin kios-kios pinggir jalan dari perbatasan Desa Astapada sampai balaidesa untuk warga. Kalaupun dari luar ada yang mau silahkan tergantung nanti kesepakatan BPD,” ujarnya.

Selain berencana meningkatkan PAD, Durakman telah melakukan upaya penyadaran masyarakat agar tetap menjaga kebersihan irigasi jalan. Pemerintah Desa Palir saat ini, telah melakukan upaya preventif agar menjaga saluran air dari sampah dengan mengisi ikan hias.

“Itu merupakan salah satu cara agar desa terlihat menarik. Adanya saluran air tersebut alhamdulillah masyarakat bisa menjadi hidup lebih bersih dan tidak membuang sampah sembarangan lagi,” ucapnya.

Namun yang masih menjadi kendala, saluran air tersebut terkadang mengalami banjir saat hujan besar. “Kalau banjir itu tidak bisa dihindar, karena airnya bukan dari hujan lokal tapi kiriman dari Sungai Cipager. Meski di sini tidak hujan tapi kalau daerah Kuningan hujan besar. Jadi tetap banjir,” tandasnya.

Ciledug Kulon

Raih PAD Hingga 120 Juta

Menginspirasi, Desa Ciledug Kulon mampu mencapai PAD hingga 120 juta dengan memanfaatkan potensi alun-alun hingga kios. Bagaimana kisahnya?



Wawan Hermawan (Kepala Desa Ciledug Kulon)

Warga Desa Ciledug Kulon patut berbangga. Pasalnya Desa ini sukses memetik Pendapatan Asli Desa (PAD) hingga Rp 120 juta rupiah pertahun. Keberhasilan itu didapat, salah satunya dari merenovasi alun-alun Ciledug Kulon.

Dahulu, alun-alun Ciledug Kulon dikenal sebagai tempat negatif. Pasalnya suasana sepi dan luas di tempat itu, acap kali dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan hal yang tak elok. Hal itu pun tentu membuat kesal warga sekitar, karena mera-

sa terganggu dengan kehadiran mereka.

“Pernah ada jam 12 malam saya melihat 2 orang sedang melakukan hubungan suami istri. Disitu saya merasa prihatin. Akhirnya tiap malam Jumat dan Minggu, pemerintah desa bersama organisasi kemasyarakatan dan Satpol PP menggelar razia. Dan alhamdulillah sekarang kondisinya aman,” ujar Fauzan, salah satu warga.

Para warga akhirnya mencoba untuk menyulapnya menjadi tempat wisata kuliner hingga tempat rekreasi. Ide merenovasi

alun-alun ini didapat dari pengalaman Kepala Desa Ciledug Kulon Wawan Hermawan, saat mengunjungi alun-alun Brebes, Tegal dan Pekalongan yang tertata cantik dan ramai pengunjung.

Lantas, Wawan pun mencoba untuk menerapkannya dengan merenovasi alun-alun Ciledug dan mensosialisasikannya ke masyarakat. Ia juga mengajak kepada para warga untuk berjualan di alun-alun.

“Setelah saya ajak, tidak sedikit warga yang merespon baik. Mereka pun berjualan hingga sekarang masih bertahan,” jelas Wawan.

Seiring perjalanan waktu, kondisi alun-alun semakin dipenuhi para penjual dan ramai pengunjung. Wawan menyebut, saat ini ada 180 orang yang bekerja di lokasi alun-alun. Terdiri dari pengelola permainan anak hingga pedagang.

“Mereka yang berjualan bukan hanya dari Desa Ciledug Kulon. Tetapi juga dari desa-desa lain sekitar kita,” tuturnya.

Selain merenovasi alun-alun, Pemdes Ciledug Kulon juga membangun usaha sewa kios dan 5 WC umum. Saat ini desa Ciledug Kulon telah memiliki 12 kios dan 5 toilet umum.

Atas keberhasilan itu, kini Desa Ciledug Kulon mendapat predikat Desa Laboratorium Sinergritas To Desa Mandiri (DLLS to DM) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menyusul itu, Wawan juga mengatakan, Pemdes Ciledug Kulon ke depan akan terus menggenjot PAD.

“Ada lahan seluas 8 hektar. Tepatnya di sekitar pintu tol keluar Kecamatan Ciledug. Di situ kami akan dirikan wisata Cikabon (Ciledug Kabupaten Cirebon),” pungkasnya. •**Muiz**

Prajawinangun Wetan Sukses Kelola Kampung *Online*

Desa Prajawinangun Wetan menobatkan diri sebagai Kampung *Online* setelah sukses melihat peluang ekonomi di masa pandemi. Bagaimana kisahnya?



Sutarno (Kepala Desa Prajawinangun Wetan)

Dampak pandemi Covid 19 setidaknya telah meluluhlantakkan perekonomian masyarakat. Tak terkecuali di Kabupaten Cirebon. Namun berbeda halnya dengan warga Prajawinangun Wetan, Kaliwedi, yang melihatnya sebagai peluang. Para warga yang

mayoritas pedagang mulai memanfaatkannya untuk berjualan secara daring.

Awalnya para warga Desa Prajawinangun Wetan hanya berjualan secara langsung. Namun karena pandemi, mereka pun mulai melakukan aktivitas jual beli dengan memanfaatkan

sosial media dan beralih menjadi pedagang *online*.

Masyarakat yang dulunya berdagang sayuran, buah-buahan keliling, berternak dan bertani kini juga tak lupa untuk ikut membuka usaha jual beli *online*. Kuwu Prajawinangun Wetan Sutarno, mengatakan, ada sekitar 80 Persen warga yang berjualan *online*, sehingga hampir setiap rumah itu memiliki toko.

Maka tak heran, predikat sebagai Kampung *Online* pun kini melekat di Desa Prajawinangun Wetan. Bahkan, Pemdes Prajawinangun Wetan sendiri telah mendeklarasikannya dengan membuat tulisan 'Selamat Datang di Kampung *Online*' pada pintu masuk atau gapura desa setempat.

Komoditas yang warga jual di pasar *online* seperti baju, kerudung, celana hingga sandal. "Tiap toko *online* bisa menjual 350 sampai 400 paket setiap harinya. Sekitar 50 ribu paket tiap harinya bisa keluar dari desa tersebut," ujar Sutarno.

Setiap sore, banyak mobil-mobil dari ekspedisi berdatangan untuk mengambil paket para warga. Berdasarkan aktivitas masyarakat tersebut, akhirnya Pemdes Prajawinangun Wetan melalui Bumdes berinisiatif untuk membuka jasa ekspedisi.

"Hingga sekarang, ada enam jasa ekspedisi di bawah Bumdes milik Prajawinangun Wetan," ungkap Sutarno.

Sutarno juga turut bangga, atas peningkatan taraf ekonomi masyarakatnya. Setiap bulannya masyarakat Prajawinangun Wetan bisa meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Selain itu, Bumdes yang ia bangun pun sudah memberikan kontribusi PAD hingga Rp 136 juta rupiah pada tahun 2020 dari hasil jasa ekspedisi. •Soy

Marikangen Siap Cetak Atlet Berprestasi

Kerap kali menjuarai pertandingan, Pemdes pun terus kembangkan potensi bidang olahraga dan siap mencetak bibit unggul kebanggaan desa.



Andriyana (Sekretaris Desa Marikangen)

Prestasi Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, menuai apresiasi pemerintah Kabupaten Cirebon. Bahkan, apresiasi serupa juga datang dari Gubernur Jawa Barat yang menghadiahkan bantuan Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) pada 2020 lalu.

Desa Marikangen, termasuk salah satu yang menyandang Desa Mandiri dan terbaik di Kabupaten Cirebon. Kategori tersebut dinilai dari berbagai aspek, salah satunya di bidang olahraga.

Cabang olahraga bola *volly* Desa Marikangen tercatat, selalu mendapat kejuaraan secara ber-

turut-turut. Terhitung sejak terbentuknya tim *volly* di tahun 1980-an. Desa Marikangen tak jarang menyabet juara pertama dalam turnamen tingkat desa maupun kecamatan.

"Kalau tidak juara satu ya juara dua, 10 April kemarin turnamen di Suranenggala juga dapat juara satu," ungkap Sekretaris Desa Marikangen Andriyana.

Tak heran jika Desa Marikangen dikenal sebagai desa dengan bidang olahraga *volly* yang baik. Setiap kali turnamen *volly* digelar, Desa Marikangen bahkan selalu mendapat unda-

ngan untuk turut meramaikan kejuaraan. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh lapisan warga Desa Marikangen.

Namun, bukan hanya olahraga bola *volly*, tim sepakbola Desa Marikangen juga eksis menjuarai beberapa pertandingan. Untuk mengembangkan olahraga sepakbola, Pemdes Marikangen saat ini sedang menyiapkan anak-anak yang memiliki minat dan bakat di bidangnya untuk dilatih, serta dijadikan bibit penerus.

Selain itu, olahraga cabang seni bela diri pencak silat bernama Budi Asih Desa Marikangen pun tak kalah unggul. Salah satu anggotanya tercatat pernah mengikuti kejuaraan antar sekolah di tingkat provinsi dan masuk dalam tiga besar pada Desember 2020 lalu.

Melihat potensi yang ada, Pemdes Marikangen berencana terus mengembangkan berbagai bidang olahraga tersebut dengan mengadakan pelatihan terbuka. Jadi, bukan hanya untuk warga desanya sendiri, melainkan untuk desa-desa lain juga.

"Pengembangan ini nantinya juga akan menjadi bekal bagi para pelajar yang akan masuk ke sekolah. Sekarang ini sekolah menerima siswa dari jalur prestasi, inilah prestasi yang kita siapkan di bidang olahraga *volly*, sepakbola, dan pencak silat," jelas Andriyana.

Deretan prestasi membanggakan dalam bidang olahraga tersebut menyalakan semangat pemdes Marikangen untuk terus menopang eksistensinya. Hal itu ditandai dengan dukungan ekstra melalui segi anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana alat dan kebutuhan masing-masing cabang olahraga. •Sar

Mohamad Luthfi



Tua Dalam Ketertinggalan

Kita sering mendengar adagium: menjadi tua itu kepastian, sedangkan menjadi dewasa itu pilihan. Tentu itu sebuah kewajaran dan bisa diterima secara nalar. Lantas bagaimana jika ada ungkapan: menjadi tua itu pilihan, dan menjadi maju itu kesulitan. Apakah ini juga sebuah kewajaran, atau justru sebuah keanehan?

Sekilas tentu aneh, kok bisa 'menjadi tua itu pilihan'. Namun, jika Anda melihat dinamika penentuan hari lahir Kabupaten Cirebon (dan Kota Cirebon) itu menjadi tidak aneh. Bisa memilih kapanpun, dan tentu saja dengan alasan atau dasar sebagai pelengkap.

Kabupaten Cirebon memilih peringatan lahir pada 2 April 1482. Bandingkan dengan Kota Cirebon yang memilih peringatan hari lahir pada 31 Desember 1388. Kota Cirebon memang jadi lebih tua. Namun dari sisi angka, ultah Kabupaten Cirebon yang ke-539 juga bukan angka yang muda.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, Kabupaten Cirebon termasuk kabupaten tertua kedua (setelah Kota Cirebon). Kabupaten Cirebon seumurannya dengan Kota dan Kabupaten Bogor yang lahir pada 3 Juni 1482. Sedangkan yang paling muda adalah Kabupaten Pangandaran, pada 25 Oktober 2012.

Melihat deretan angka lahir kabupaten/kota di Jawa Barat, maka Kabupaten Cirebon memilih (atau memang sebenarnya) berumur tua. Kenapa memilih? Karena masih menjadi polemik dan diskursus kesejarahan. Kabupaten dan Kota Cirebon tidak kompak, sekandung tapi beda hari lahir. Berbeda dengan Kabupaten dan Kota Bogor yang hari lahirnya sama.

Sebagai kabupaten tua, bagaimana dengan pencapaian Cirebon? Berbanding luruskah dengan usianya? Beberapa angka statistik menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon cukup terbelakang dibanding kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

Pada 2019, angka pengangguran tertinggi se-Jawa Barat, mencapai 10,35 persen. Setelah pandemi (pada 2020) merosot tajam menjadi 11,52 persen.

Angka ini jauh di atas angka kemiskinan Jabar (10,46 persen), dan nasional (7,07 persen). Jika angkatan kerja di Kabupaten Cirebon 1,6 juta jiwa, maka pengangguran terbuka sebanyak 184.320 orang.

Prosentase kemiskinan di Kabupaten Cirebon masuk lima besar Jabar. Pada 2019, menyentuh angka 9,94 persen, dan pada 2020 merosot tajam di angka 11,24 persen. Lagi-lagi jauh di atas rata-rata kemiskinan di Jabar (7,88 persen) dan nasional (9,78 persen).

Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Cirebon yang hanya Rp 15,3 juta per orang per tahun. Ini masih di bawah rata-rata PDRB Jabar sebesar Rp 30 juta per orang per tahun.

Jauh jika dibandingkan Karawang yang mencapai Rp 69,5 juta per orang per tahun. Padahal Karawang lebih muda, lahir pada 14 September 1633.

Deretan angka di atas menunjukkan bahwa umur kota/kabupaten tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan dan kemajuan. Maka, ungkapan bahwa 'menjadi tua itu pilihan, dan menjadi maju itu kesulitan' menjadi relevan disini.

Ungkapan itu patut menjadi otokritik, kita tak perlu *baper* atau tersinggung. Cukuplah itu menjadi pelecut semangat untuk membenahi. Cukuplah itu menjadi cermin setiap peringatan hari jadi Kabupaten Cirebon: sudahkah kita semaju usia kita?

Jika kita selalu mendapati angka statistik yang sama di setiap HUT, maka kita masih berjalan di tempat. Tak perlulah kita berbangga dengan umur daerah. Tak perlulah kita menggelar pesta berlebihan yang menghabiskan uang rakyat.

Rakyat tidak butuh peringatan HUT. Rakyat butuh kado berupa mudahnya mencari pekerjaan, infrastruktur yang baik, kesejahteraan meningkat, pendidikan terjangkau, sampah terkelola dengan baik, dan fasilitas kesehatan memadai.

Rakyat ingin ada terobosan dan upaya-upaya *extra ordinary* untuk mengejar ketertinggalan. Jangan malu belajar pada yang muda. Jika tidak, kita terus tua dalam ketertinggalan.



SEKRETARIS DPRD DAN SELURUH PEGAWAI

Mengucapkan

Marhaban ya
Ramadhan

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa
1 Ramadhan 1442 H



PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Mengucapkan Selamat



*Mamayu Hayuning Diri,
Mamayu Hayuning Buisana*
Menata kemuliaan diri, menata kemuliaan dunia